



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 574 TAHUN 2019

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 162 TAHUN 2019
TENTANG GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas Gugus Tugas Reforma Agraria di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Keputusan Gubernur Nomor 162 Tahun 2019 tentang Gugus Tugas Reforma Agraria, perlu disempurnakan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 162 Tahun 2019 tentang Gugus Tugas Reforma Agraria;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria;
5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 162 TAHUN 2019 TENTANG GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA.

Pasal I

Lampiran Keputusan Gubernur Nomor 162 Tahun 2019 tentang Gugus Tugas Reforma Agraria, diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

Pasal II

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 April 2019



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ames Baswedan
AMES BASWEDAN

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 574 TAHUN 2019

Tanggal 9 April 2019

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA PROVINSI

- Ketua : Gubernur Provinsi DKI Jakarta
- Wakil Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Ketua Pelaksana Harian 1 : Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta
- Ketua Pelaksana Harian 2 : Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris 1 : Kepala Bidang Penataan Pertanahan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris 2 : Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
- Anggota :
1. Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup
 2. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 4. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
 5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
 6. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
 7. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
 8. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
 9. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta
 10. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta
 11. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta
 12. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta
 13. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta
 14. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
 15. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta

16. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
17. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
18. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
19. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
20. Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta
21. Kepala Bidang Infrastruktur Pertanahan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta
22. Kepala Bidang Hubungan Hukum Pertanahan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta
23. Kepala Bidang Penataan Pertanahan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta
24. Kepala Bidang Pengadaan Tanah Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta
25. Kepala Bidang Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta
26. Unsur Masyarakat dan/atau Akademisi

B. SUSUNAN KEANGGOTAAN GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA KOTA ADMINISTRASI

- | | | |
|--------------------------|---|--|
| Ketua | : | Walikota |
| Wakil Ketua | : | Sekretaris Kota |
| Ketua Pelaksana Harian 1 | : | Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi |
| Ketua Pelaksana Harian 2 | : | Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Kota |
| Sekretaris 1 | : | Kepala Seksi Penataan Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Administrasi |
| Sekretaris 2 | : | Kepala Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi |
| Anggota | : | <ol style="list-style-type: none"> 1. Inspektur Pembantu Kota Administrasi 2. Kepala Suku Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Administrasi 3. Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Administrasi 4. Kepala Suku Badan Pengelola Aset Daerah Kota Administrasi |

5. Kepala Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi
6. Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi
7. Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi
8. Kepala Suku Dinas Kehutanan Kota Administrasi
9. Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi
10. Kepala Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Kota Administrasi
11. Kepala Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi
12. Kepala Suku Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Kota Administrasi
13. Kepala Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kota Administrasi
14. Kepala Suku Dinas Perindustrian dan Energi Kota Administrasi
15. Kepala Bagian Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Kota Administrasi
16. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kota Administrasi
17. Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Pertanahan Kota Administrasi
18. Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Administrasi
19. Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Administrasi
20. Kepala Seksi Pengadaan Tanah Kantor Pertanahan Kota Administrasi
21. Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Administrasi
22. Unsur Masyarakat dan/atau Akademisi

C. SUSUNAN KEANGGOTAAN GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA KABUPATEN ADMINISTRASI

- | | | |
|--------------------------|---|--|
| Ketua | : | Bupati |
| Wakil Ketua | : | Sekretaris Kabupaten |
| Ketua Pelaksana Harian 1 | : | Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara |
| Ketua Pelaksana Harian 2 | : | Asisten Administrasi, Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Kabupaten |
| Sekretaris 1 | : | Kepala Seksi Penataan Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara |

Sekretaris 2

Kepala Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan
Pertanahan Kabupaten Administrasi

Anggota

- :
1. Inspektur Pembantu Kabupaten Administrasi
 2. Kepala Suku Badan Pengelola Keuangan Daerah
Kota Administrasi Jakarta Utara
 3. Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kabupaten Administrasi
 4. Kepala Suku Badan Pengelola Aset Daerah
Kabupaten Administrasi
 5. Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air Kabupaten
Administrasi
 6. Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Administrasi
 7. Kepala Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan
dan Pertanian Kabupaten Administrasi
 8. Kepala Suku Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman Kabupaten Administrasi
 9. Kepala Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan
Anak dan Pengendalian Penduduk Kabupaten
Administrasi
 10. Kepala Suku Dinas Perindustrian dan Energi
Kabupaten Administrasi
 11. Kepala Bagian Keuangan, Ekonomi dan Pembangunan
Kabupaten Administrasi
 12. Kepala Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan
Rakyat Kabupaten Administrasi
 13. Kepala Unit Kerja Teknis 1 Kabupaten Administrasi
 14. Kepala Unit Kerja Teknis 2 Kabupaten Administrasi
 15. Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Pertanahan
Kota Administrasi Jakarta Utara
 16. Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan Kantor
Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara
 17. Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan Kantor
Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara
 18. Kepala Seksi Pengadaan Tanah Kantor Pertanahan
Kota Administrasi Jakarta Utara
 19. Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian
Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Administrasi
Jakarta Utara
 20. Unsur Masyarakat dan/atau Akademisi



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Anies Baswedan
ANIES BASWEDAN